

# The Mughal Dynasty in India: Genealogy of Power, Expansionist Politics, and the Causes of Its Decline (1526–1858)

Maftuh Ajmain

*UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, Indonesia*  
[maftuh@uinbanten.ac.id](mailto:maftuh@uinbanten.ac.id)

---

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: November 21, 2025

Accepted: March 7, 2026

Published: March 8, 2026

---

DOI : 10.20885/abhats.vol7.iss1.art7  
PP : 73-84

### Keyword:

*Mughal Dynasty, Islamic India, Expansionist Politics, British Colonialism, Decline of Power*

## ABSTRACT

The Mughal Dynasty in India was one of the largest political powers in the history of the Islamic world, ruling from 1526 to 1858. This article examines the origins of this dynasty, the development of its administration from Babur to Aurangzeb, as well as the various political, economic, artistic, and cultural advancements achieved. Furthermore, this study analyzes the internal and external factors that led to its decline and eventual collapse in the mid-19th century. Using a historical-descriptive approach, this research demonstrates that the initial success of the Mughal Dynasty was underpinned by strong leadership, measured expansion, and a culture of tolerance. Conversely, its decline was triggered by weakening leadership, internal conflicts, the resurgence of Hindu society, and British colonial intervention through the British East India Company. These findings emphasize that the dynamics of Mughal triumph and collapse serve as a significant example of the relationship between leadership, social stability, and foreign political influence in the history of Islam in South Asia.

---

# Dinasti Mughol India: Genealogi Kekuasaan, Politik Ekspansi dan Sebab-Sebab Kemundurannya (1526–1858)

---

## ABSTRAK

---

### Kata kunci:

*Dinasti Mughol, India Islam, Politik Ekspansi, Kolonialisme Inggris, Kemunduran Kekuasaan*

Dinasti Mughol India merupakan salah satu kekuatan politik terbesar dalam sejarah dunia Islam yang berkuasa sejak tahun 1526 hingga 1858. Artikel ini mengkaji asal-usul kemunculan dinasti ini, perkembangan pemerintahan dari Babur hingga Aurangzeb, serta berbagai kemajuan politik, ekonomi, seni, dan budaya yang dicapai. Selain itu, tulisan ini juga menelaah faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemunduran dan kehancurannya pada pertengahan abad ke-19. Dengan pendekatan historis-deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan awal dinasti Mughol ditopang oleh kepemimpinan kuat, ekspansi terukur, dan budaya toleransi, sedangkan kemundurannya dipicu oleh melemahnya kepemimpinan, konflik internal, kebangkitan masyarakat Hindu, serta intervensi kolonial Inggris melalui British East India Company. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika kejayaan dan keruntuhan Mughol merupakan contoh penting hubungan antara kepemimpinan, stabilitas sosial, dan kekuatan politik asing dalam sejarah Islam di Asia Selatan.

## A. PENDAHULUAN

Dinasti Mughol India memiliki peran penting dalam sejarah politik dan peradaban Islam, terutama di Asia Selatan. Didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526, dinasti ini menandai lahirnya kerajaan besar yang memadukan warisan budaya Timur Tengah, Persia, dan India (Asher, 1992; Eraly, 2000). Dalam perjalanan panjangnya, dinasti Mughol mencapai masa kejayaan terutama pada masa Akbar, Jahangir, dan Syah Jahan dalam bidang administrasi, militer, ekonomi, serta seni arsitektur seperti pembangunan Taj Mahal (Richards, 1993)

Namun, periode kejayaan tersebut tidak bertahan lama seiring dengan munculnya tanda-tanda disintegrasi sistemik pada awal abad ke-18. Memasuki abad tersebut, Dinasti Mughol mengalami kemunduran akut akibat suksesi kepemimpinan yang lemah serta krisis administrasi pada sistem *jagirdari* yang memicu korupsi dan perebutan faksi di lingkungan istana (Chandra, 2002). Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya fanatisme keagamaan dan fragmentasi politik internal yang melumpuhkan otoritas pusat (Dalrymple, 2019). Di sisi lain, dinamika hubungan antara identitas Hindu dan Muslim menjadi sangat rentan setelah diterapkannya kebijakan ortodoksi yang kaku pada era akhir pemerintahan Aurangzeb seperti pemberlakuan kembali pajak *jizyah* yang kemudian memicu perlawanan militer dari kelompok Rajput, Sikh, dan Maratha (Truschke, 2017).

Situasi internal yang kacau ini dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial Inggris melalui *British East India Company* (BEIC) yang mulai mendominasi lanskap politik dan ekonomi India secara agresif (Dalrymple, 2019). Krisis agraria dan beban pajak yang berlebihan pada petani juga turut mempercepat keruntuhan ekonomi dari tingkat akar rumput (Habib, 2014). Berdasarkan alasan historis tersebut, sangat penting untuk menelaah dialektika mengenai kemunculan, ekspansi, hingga keruntuhan dinasti ini. Kajian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola kekuasaan dalam masyarakat multikultural yang kompleks, serta bagaimana relasi antara otoritas tradisional Islam berbenturan dengan kekuatan imperialisme modern di Asia Selatan.

## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menelaah sejarah, perkembangan, serta dinamika kekuasaan Dinasti Mughol di India. Metode ini dipilih karena fokus penelitian merupakan fenomena historis yang bersandar pada penelusuran berbagai literatur tertulis, baik sumber primer maupun sekunder, yang relevan dengan garis waktu kekuasaan Mughol.

Secara spesifik, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-historis. Pendekatan kualitatif difungsikan untuk membedah data berupa narasi, teks, dan dokumen sejarah yang bersifat non-angka. Sementara itu, perspektif historis diterapkan guna merekonstruksi fakta secara kronologis terkait berdirinya kerajaan, perluasan wilayah, peran para sultan, hingga faktor-faktor sosial-keagamaan yang memengaruhi stabilitas dinasti pada setiap periodenya.

Prosedur penelitian sejarah yang digunakan mencakup empat tahapan sistematis, yaitu:

1. **Heuristik:** Tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan.
2. **Kritik Sumber:** Verifikasi keaslian dan kredibilitas data yang ditemukan.
3. **Interpretasi:** Penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diuji.
4. **Historiografi:** Penulisan hasil penelitian menjadi sebuah laporan ilmiah yang utuh.

Penerapan keempat langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kajian sejarah yang kritis,

akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sejarah Islam di India Sebelum Dinasti Mughol

Eksistensi Dinasti Mughol di anak benua India membentang selama lebih dari tiga abad, tepatnya sejak tahun 1526 hingga 1858 (Richards, 1993). Kerajaan besar ini dipelopori oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seorang penakluk asal Asia Tengah yang memiliki pertalian darah dengan tokoh besar Timur Lenk (1370–1405 M) (Gascoigne, 1971). Secara genealogis, Babur merupakan keturunan etnis Mongol dari garis Jengis Khan yang telah memeluk agama Islam dan sempat memegang kendali kekuasaan di wilayah Asia Tengah pada abad ke-15 (Eraly, 2007). Menariknya, penyebutan "Mughol" sendiri sebenarnya merupakan bentuk adaptasi istilah "Mongol" yang diserap dari bahasa Persia untuk merujuk pada keturunan Turki-Mongol di India (Gascoigne, 1971; Eraly, 2007).

Langkah awal ekspansi Babur dimulai dengan penaklukan Kabul sebagai basis pertahanan baru pasca kehilangan Farghanah, yang kemudian dilanjutkan dengan pergerakan pasukannya menyeberangi perbatasan India melalui celah strategis Khyber Pass pada tahun 1505 (Nasution, 1978; Thackston, 1996). Pergerakan ini merupakan bagian dari ambisi jangka panjangnya untuk mengamankan wilayah yang lebih stabil di selatan (Richards, 1993).

Silsilah lengkap pendiri dinasti Mughol ini adalah Babur bin Umar Syekh bin Abu Sa'id bin Sulthan Muhammad bin Miran Syah bin Timur (Rofiq, 2019). Nasab dari jalur ayahnya sampai pada Timur Lenk yang secara genealogis termasuk keturunan Chagatai, putra Jengis Khan (Rofiq, 2019). Sedangkan dari jalur ibunya, yaitu Qutluk Nigar Khanum, garis keturunannya juga tersambung langsung ke Jengis Khan, menjadikannya pewaris tunggal dari dua imperium terbesar di Asia Tengah (Thackston, 1996).

Kehadiran kekuasaan Islam di anak benua India sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum fajar Dinasti Mughol menyingsing. Penetrasi awal Islam di wilayah ini dimulai secara formal pada masa Khalifah al-Walid dari Dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi militer strategis yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim pada awal abad ke-8. (Wink, 2002) menekankan bahwa periode ini bukan sekadar penaklukan militer, melainkan titik awal terbentuknya sintesis budaya Indo-Islam yang permanen di wilayah Sindh dan sekitarnya.

Jauh sebelum era Babur, stabilitas politik di India Utara mulai dipengaruhi oleh kekuatan dari Asia Tengah, khususnya Dinasti Ghaznawi yang dipimpin oleh Sultan Mahmud. Pada kisaran tahun 1020 M, ia berhasil menundukkan mayoritas kerajaan Hindu di wilayah tersebut serta menginisiasi proses Islamisasi pada sebagian penduduk setempat melalui perlindungan terhadap para ulama dan cendekiawan. (Bosworth, 1963) mencatat bahwa Sultan Mahmud menjadikan India sebagai pusat perluasan pengaruh kebudayaan Persia-Islam yang megah. Pasca-runtuhnya kekuatan Ghaznawi, wilayah India kemudian dikuasai secara bergantian oleh dinasti-dinasti dalam payung Kesultanan Delhi, seperti Dinasti Mamluk (1206-1290), Khalji (1296-1316), serta Tughlaq (1320-1412) yang masing-masing memberikan kontribusi unik pada administrasi dan pertahanan wilayah.

Pada tahun 1398, benih-benih kekuasaan Timuriyah mulai nampak ketika Pir Muhammad, cucu dari Timur Lenk yang menjabat sebagai Gubernur Timuriyah di Kabul, mulai menjejakkan pengaruhnya dengan menguasai wilayah Uchh dan Multan di tengah krisis Dinasti Tughlaq. Dinamika ini mencapai puncaknya ketika Timur Lenk sendiri melakukan intervensi militer ke

India. Setelah penunjukan gubernur di Dipalpur berakhir tragis karena pembunuhan oleh penduduk lokal, Timur melancarkan serangan balasan yang sangat destruktif ke wilayah Dipalpur, Bhatner, Panipat, hingga Delhi. (Jackson, 1999) berpendapat bahwa serangan Timur pada tahun 1399 ini secara efektif melumpuhkan kekuatan Kesultanan Delhi, yang pada gilirannya menciptakan kekosongan kekuasaan dan membuka jalan bagi keturunannya, Babur, untuk mendirikan imperium baru di masa depan.

### **Perjuangan Babur dan Berdirinya Dinasti Mughol**

Zahiruddin Muhammad Babur lahir pada 14 Februari 1483 dan naik takhta di Farghanah pada tahun 1494 menggantikan ayahnya, Umar Mirza, saat baru berusia 11 tahun (Yatim, 2000). Memiliki ambisi besar untuk menguasai Samarkand, ia sempat mengalami kegagalan sebelum akhirnya berhasil menaklukkannya dengan bantuan Ismail I dari Dinasti Safawiyah, dan kemudian menduduki Kabul pada tahun 1504 (Yatim, 2000).

Ekspansi Babur ke India berawal dari krisis stabilitas di bawah pemerintahan Ibrahim Lodi. Hal ini mendorong paman Lodi, Alam Khan, bersama Daulat Khan (Gubernur Lahor) untuk meminta bantuan Babur di Kabul guna menggulingkan pemerintahan di Delhi (Tim Penyusun, 2003). Meski aliansi awal ini sempat retak karena kecurigaan terhadap motivasi Babur, Babur justru berhasil mengalahkan kekuatan gabungan mereka dan merebut Lahore pada 1523 sebelum bergerak menuju Panipat (Tim Penyusun, 2003).

Puncak pendirian dinasti ini terjadi setelah Babur menguasai Punjab pada 1525 dan memimpin pasukannya menuju Delhi. Dalam Pertempuran Panipat yang sangat dahsyat pada 21 April 1526, pasukan Babur yang hanya berjumlah 25.000 personel secara gemilang mengalahkan 100.000 tentara dan 1.000 gajah milik Ibrahim Lodi (Yatim, 2000). Terbunuhnya Ibrahim Lodi dalam palagan tersebut membuka jalan bagi Babur untuk memasuki Delhi sebagai pemenang, yang secara resmi menandai lahirnya Kerajaan Dinasti Mughol di India (Yatim, 2000).

### **Dinamika Pemerintahan Dinasti Mughol**

Keberhasilan kilat yang diraih oleh Babur segera memicu reaksi defensif dari jajaran penguasa Hindu di wilayah tersebut. Deklarasi kekuasaan yang dikumandangkan pada tahun 1526 mendapatkan tantangan serius dari pemimpin Rajput, yakni Rana Sangram atau yang lebih populer dengan nama Rana Sanga. Sang penguasa Rajput ini memiliki ambisi besar untuk menyingkirkan Babur dengan menghimpun kekuatan militer yang masif, terdiri dari 120 komandan tempur serta 80.000 prajurit bergajah yang siaga. Namun, dalam palagan yang pecah di Khauna pada tanggal 16 Maret 1527, Babur kembali membuktikan keunggulan strateginya dengan meraih kemenangan telak, sementara Rana Sanga sendiri tewas dalam pertempuran tersebut.

Di sisi lain, loyalis dari kalangan bangsawan etnis Afghan masih menaruh kesetiaan kepada keluarga Lodi yang telah tumbang. Mereka melakukan konsolidasi kekuatan dengan menobatkan Muhammad, adik kandung dari Ibrahim Lodi, sebagai sultan baru untuk menandingi legitimasi Mughol. Meskipun demikian, Babur mampu mematahkan perlawanan tersebut dengan relatif mudah dalam sebuah konfrontasi militer yang terjadi di dekat wilayah Gogra pada tahun 1529.

Masa kepemimpinan sang pendiri dinasti berakhir pada tanggal 26 Desember 1530, ketika

Babur mengembuskan napas terakhirnya di usia 48 tahun setelah memegang tampuk kekuasaan selama tiga dekade. Prosesi pemakamannya pada awalnya dilaksanakan di wilayah Agra, namun sembilan tahun kemudian jenazahnya dipindahkan untuk dimakamkan secara permanen di Kabul (Gascoigne, 1971).

Tingkat estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada putranya, Nasiruddin Muhammad yang lebih dikenal dengan gelar Humayun, yang lahir di Kabul pada 6 Maret 1508. Sayangnya, kapasitas kepemimpinan Humayun dinilai tidak sebanding dengan kegigihan sang ayah dalam mengelola negara. Selama sembilan tahun masa pemerintahannya, ia terjebak dalam pusaran ancaman dan gangguan keamanan yang tiada henti, sehingga fokusnya habis terkuras untuk memadamkan berbagai pemberontakan domestik tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan inovasi pembangunan. Situasi ini diperparah oleh pembangkangan politik yang dilakukan oleh adik-adiknya sendiri, yakni Kamran dan Askari, yang terus merongrong kebijakannya.

Salah satu konflik bersenjata yang cukup signifikan pada masa ini adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Bahadur Syah, penguasa Gujarat yang berusaha memisahkan diri dari otoritas Delhi. Dalam kampanye militer ini, Humayun sebenarnya sempat menunjukkan taringnya dengan berhasil menundukkan kekuatan Bahadur dan membawa wilayah Gujarat kembali ke bawah kendali administrasi pusat (Gascoigne, 1971).

Prahara besar yang sesungguhnya muncul dari figur Syir Syah atau Sher Khan yang berasal dari wilayah Afghanistan. Dalam konfrontasi yang menentukan ini, Humayun menderita kekalahan pahit yang menyebabkan runtuhnya otoritas Mughol secara temporal. Wilayah kedaulatan warisan Babur yang membentang dari Lahore dan Punjab di utara, Gogra dan Bihar di timur, hingga kawasan India tengah seperti Gwalior, Chanderi, dan Mewar, jatuh ke bawah kekuasaan Sher Khan pada tahun 1539. Sementara itu, wilayah Kabul dan Kandahar direbut oleh saudara-saudaranya sendiri, Kamran dan Askari, yang memaksa Humayun melarikan diri dari Delhi menuju Umartkot pada tahun 1542 hingga akhirnya ia mengungsi ke wilayah Persia. Di sana, ia mendapatkan suaka dari penguasa Dinasti Safawiyah, Sultan Tahmasp I, pada tahun 1544, dengan kompensasi diplomatik di mana Humayun diharuskan beralih mengikuti madzhab Syiah.

Momentum kebangkitan Humayun akhirnya tiba berkat dukungan militer yang masif dari Dinasti Safawiyah sebanyak 120.000 personel tentara. Dengan kekuatan tersebut, ia berhasil memukul balik pasukan Sher Khan dalam pertempuran di Sarhind pada 22 Juni 1555, dan secara resmi menduduki kembali takhtanya keesokan harinya. Namun, periode kekuasaan keduanya sangat singkat; pada 20 Januari 1556, ia mengalami kecelakaan fatal dengan terjatuh di perpustakaan dan meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1556 (Rofiq, 2019). Setelah wafatnya Humayun, kendali Kekaisaran Mughol diteruskan oleh putranya, Akbar I, yang saat itu baru menginjak usia 14 tahun.

Sultan Akbar I, atau Abu al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbar, dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1542. Mengingat usianya yang masih belia saat naik takhta, roda pemerintahan Mughol untuk sementara waktu dijalankan oleh wali sultan, Muhammad Bairam Khan, yang beraliran Syiah. Namun, gaya kepemimpinan Bairam Khan yang cenderung memaksakan doktrin keagamaannya kepada pihak lain memicu ketidaksenangan di lingkungan istana, yang pada akhirnya berujung pada pemecatan dirinya dari jabatan strategis tersebut pada tahun 1561.

Sultan Akbar I memegang kendali kekuasaan dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni sejak tahun 1556 hingga 1603, yang menjadi periode emas di mana Dinasti Mughol

mencapai puncak supremasinya. Pada era ini, stabilitas politik berhasil dipulihkan dan seluruh wilayah kedaulatan yang sempat terlepas pada masa pemerintahan Humayun berhasil direbut kembali ke pangkuan imperium. Salah satu momentum krusial dalam mengokohkan legitimasinya terjadi pada Pertempuran Panipat II tanggal 5 November 1556, di mana pasukan Mughol berhasil mematahkan kekuatan Hemu, seorang menteri Hindu pada masa Sher Shah yang sempat memproklamkan diri sebagai Raja Vikramaditya.

Dalam ambisi memperluas pengaruhnya, Sultan Akbar I melancarkan serangkaian ekspansi militer yang masif ke berbagai penjuru mata angin. Di wilayah selatan dan timur, ia secara beruntun berhasil menaklukkan Malwa dan Chundar pada tahun 1561, diikuti oleh Kerajaan Ghond (1564), serta benteng-benteng strategis seperti Chitor (1568), Rhantabar (1569), dan Kalinjar (1569). Kekuasaan Mughol semakin tak terbendung setelah berhasil menguasai wilayah Gujarat (1572), pelabuhan Surat (1573), serta kawasan subur Bihar (1574) dan Bengal (1576) (Nasution, 2013).

Ekspansi berlanjut ke perbatasan utara yang menghasilkan penguasaan atas Kashmir pada tahun 1586, memberikan kedalaman strategis bagi pertahanan pusat. Selanjutnya, militer Mughol merambah ke arah barat laut Delhi dengan menduduki Shind pada 1590, serta melakukan penetrasi ke wilayah Deccan (1596), Narnala (1598), Ahmadnagar (1600), dan Asitgah (1601). Mengingat luasnya wilayah kekuasaan tersebut, Akbar menerapkan sistem administrasi yang sangat militeristik, di mana setiap pejabat pemerintah tanpa pengecualian diwajibkan untuk menjalani pelatihan militer secara berkala guna menjamin kedisiplinan dan loyalitas tinggi.

Dalam dimensi sosial dan keagamaan, Akbar memperkenalkan kebijakan revolusioner yang dikenal sebagai *shulh-i kull* atau toleransi universal untuk menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat India yang majemuk. Kebijakan ini mencakup penghapusan pajak *jizyah* bagi warga non-muslim, praktik pernikahan politik dengan perempuan Hindu, hingga partisipasi aktif sultan dalam perayaan agama Hindu. Selain itu, ia membangun *ibadat-khana* sebagai ruang dialog lintas iman dan merumuskan konsep eklektik *din-i Ilahi* sebagai upaya untuk menyatukan beragam penganut agama dalam satu ikatan kebangsaan (Nasution, 2013).

Secara politis, *din-i Ilahi* difungsikan oleh Akbar sebagai instrumen utama untuk mencari legitimasi sekaligus menciptakan struktur kepemimpinan yang loyal langsung di bawah komandonya. Para pengikut setia dalam lingkaran ini diharuskan mengikrarkan sumpah suci untuk mengabdikan jiwa, raga, harta, dan kehormatan mereka sepenuhnya demi melayani Sultan. Perlu digarisbawahi bahwa *din-i Ilahi* sejatinya bukanlah sebuah agama baru, melainkan sebuah perkumpulan spiritual-politik yang dirancang agar para elit kerajaan, baik dari kalangan Muslim maupun Hindu, memiliki kesetiaan tunggal kepada otoritas pusat.

Terdapat beberapa faktor fundamental yang melatarbelakangi lahirnya *din-i Ilahi*, di antaranya adalah keresahan Akbar atas perpecahan dan konflik pendapat yang tajam di kalangan ulama dan pemimpin agama tradisional. Kondisi rakyat yang cenderung fanatik dan mudah terprovokasi oleh tokoh agama juga mendorong Sultan untuk mengambil jalan tengah demi stabilitas keamanan. Pengaruh pemikiran dari para penasihat liberal seperti Abu Fadhl Allami, Mir Abdul Lathif, dan Syekh Mubarak turut berperan besar dalam mendorong Akbar untuk mengadopsi cara pandang yang lebih terbuka dan rasional dalam memimpin (Rofiq, 2019).

Namun, senja kala kepemimpinan Akbar diwarnai oleh konflik internal keluarga, terutama

pemberontakan yang dilakukan oleh putranya, Salim, pada tahun 1600. Meskipun upaya makar tersebut gagal dan berakhir dengan rekonsiliasi yang dimediasi oleh istri Akbar, sang Sultan tetap dirundung kesedihan mendalam menyusul kematian putranya yang lain, Daniyal, akibat komplikasi kesehatan karena konsumsi minuman keras yang berlebihan. Akbar akhirnya wafat karena sakit pada tanggal 25 Oktober 1605, dan tampuk kekuasaan secara resmi diwariskan kepada Salim.

Salim naik takhta dengan menyandang gelar kebesaran Abu al-Muzhaffar Nuruddin Muhammad Jahangir Padi Sya-i Ghazi. Pada awal masa pemerintahannya di tahun 1606, Jahangir harus menghadapi ujian berat berupa pemberontakan yang dilancarkan oleh putra tertuanya sendiri, Khusraw. Meskipun demikian, ia berhasil memadamkan pergolakan tersebut secara efektif, di mana insiden ini juga menyebabkan tewasnya Khusraw beserta guru spiritualnya yang bernama Arjun.

Memasuki tahun 1611, dinamika politik di istana mulai banyak dipengaruhi oleh peran Nur Jahan, istri tercinta Jahangir yang merupakan janda dari Ali Quli Khan Istajlu. Dominasi Nur Jahan di pemerintahan memicu ketegangan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya, hingga pada tahun 1623 terjadilah pemberontakan oleh Khurram (Syah Jahan) yang merasa posisinya sebagai pewaris takhta terancam oleh manuver Nur Jahan yang lebih mendukung Syahryar. Kendati demikian, Jahangir masih cukup tangguh untuk mematahkan ambisi Khurram pada tahun 1626.

Era kepemimpinan Jahangir tercatat berhasil memberikan kontribusi besar pada stabilitas ekonomi dan kemajuan seni budaya, namun pribadinya sangat terikat pada ketergantungan alkohol dan opium hingga ia wafat karena sakit pada 28 Oktober 1627. Pasca wafatnya Jahangir, terjadi perebutan kekuasaan singkat di mana Perdana Menteri Ashaf Khan kemudian memihak kepada Syah Jahan setelah berhasil menyingkirkan rivalnya, Syahryar, pada Januari 1628. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari 1628, Syah Jahan secara resmi dinobatkan sebagai sultan baru yang memimpin Dinasti Mughol (Rofiq, 2019).

Syah Jahan, yang memiliki nama lengkap Syihabuddin Syah Jahan Khurram, lahir pada tahun 1592 sebagai putra dari Sultan Jahangir dan permaisurinya, Manmati, seorang putri dari kalangan Rajput. Langkah politik Syah Jahan bersama Ashaf Khan dalam menyingkirkan para pesaing takhta dianggap sebagai catatan kelam yang mempengaruhi stabilitas internal dinasti di masa depan. Di bidang wilayah, Mughol sempat merebut Qandahar dari Safawiyah pada 1638, meski wilayah tersebut kembali lepas pada 1649. Selain itu, ia melancarkan serangan terhadap bangsa Uzbek dan menguasai Balkh serta Badakhshyan pada 1646, walaupun setahun kemudian pasukannya harus meninggalkan daerah tersebut. (Gascoigne, 1971) .

Pemerintahan Syah Jahan sangat identik dengan ekspansi pembangunan infrastruktur dan fisik yang masif, yang paling terkemuka adalah pembangunan mausoleum Taj Mahal. Bangunan ini didirikan sebagai makam bagi Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal, dimulai sejak tahun 1631 dan tuntas pada tahun 1643. Permaisuri Mumtaz Mahal sendiri wafat pada 17 Juni 1643 saat melahirkan anak mereka yang ke-14.

Taj Mahal, yang berarti "Istana Pilihan", dibangun sebagai simbol penghormatan abadi bagi mendiang istrinya yang dikenal memiliki kecantikan luar biasa serta keluhuran budi. Mumtaz Mahal, yang dinikahi pada tahun 1612, dikenal sangat aktif dalam kegiatan sosial dengan mendirikan berbagai panti asuhan, sekolah, serta tempat peribadatan bagi semua pemeluk agama meskipun ia dan Sultan beragama Islam.

Proyek kolosal Taj Mahal ini melibatkan tidak kurang dari 20.000 pekerja dengan total biaya mencapai 40 juta Rupee. Bangunan ini menjadi representasi puncak kejayaan Dinasti Mughol, di mana stabilitas keamanan dalam masyarakat yang majemuk dapat terjaga melalui kebijakan toleransi beragama yang kuat. Syah Jahan secara konsisten melanjutkan prinsip kebijakan inklusif *Din-i Ilahi* yang telah dicanangkan oleh kakeknya, Sultan Akbar.

Jenazah Mumtaz Mahal dimakamkan di dalam mausoleum tersebut, yang kelak disusul oleh makam Syah Jahan sendiri. Sebelum wafat, Sultan sebenarnya merencanakan pembangunan makam pribadi serupa dari marmer hitam di seberang Sungai Yamuna yang akan dihubungkan dengan sebuah jembatan. Namun, impian artistik ini tidak pernah terwujud karena ia dikudeta dan dipenjarakan oleh putranya, Aurangzeb, hingga meninggal di dalam tahanan pada tahun 1666. (Tim Penyusun, 2003) .

Selain Taj Mahal, warisan fisik Syah Jahan lainnya adalah pembangunan kota baru bernama Syah Jahan Abad di Delhi pada tahun 1638. Semangat toleransinya juga tercermin melalui upaya penerjemahan kitab Upanishad dan penulisan karya filosofis *Majma' al-Bahrain* oleh putranya, Dara Syukoh, yang mencoba menyelaraskan ajaran Sufisme dengan Vedanta.

Setelah era Syah Jahan berakhir, takhta beralih ke tangan Aurangzeb, yang bergelar Abu al-Muzhaffar Muhammad Muhyiddin Aurangzib Alamghir Padi Syah-i Ghazi. Ia merupakan putra ketiga dari pasangan Syah Jahan dan Mumtaz Mahal yang lahir pada 3 November 1618 di Malwa. Aurangzeb berhasil mengamankan kekuasaan setelah memenangkan persaingan dengan saudara-saudaranya pada 1658, dan masa kepemimpinannya ditandai dengan upaya ekspansi militer yang sangat agresif.

Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan di bawah komandonya meliputi Kuch Behar, Assam, Surat, Bijapur, hingga Gulkanda. Motivasi utama di balik perluasan wilayah ini adalah ambisi untuk menyatukan seluruh daratan India di bawah satu kendali politik guna menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Keberhasilan Aurangzeb didukung oleh keteguhan religiusnya yang tinggi, dukungan penuh para ulama, serta kekuatan angkatan perang yang sangat disiplin.

Sebagai penganut Islam yang ortodoks, Aurangzeb menerapkan hukum syariat secara kaku selama masa kepemimpinannya. Ia berkeyakinan bahwa seluruh problematika sosial hanya dapat diselesaikan melalui penerapan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memicu diterapkannya kembali pajak *jizyah*, pelarangan minuman keras, pembatasan hiburan musik yang dianggap boros, serta pembentukan lembaga pengawas moral untuk memantau pelaksanaan undang-undang agama.

Penerapan aturan yang sangat rigid ini menyebabkan masyarakat beragama Hindu merasa tertekan dan cenderung melihat Aurangzeb sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini diperparah dengan pengawasan ketat terhadap ritual keagamaan Hindu yang merupakan agama mayoritas penduduk. Setiap kegiatan keagamaan memerlukan izin resmi, dan Aurangzeb tidak segan untuk meruntuhkan kuil-kuil Hindu yang dianggapnya telah diselewengkan sebagai pusat pergerakan politik oposisi. (Rofiq, 2019) .

### **Transisi Kekuasaan dan Dinamika Sosial Pasca-Aurangzeb**

Sultan Aurangzeb mengembuskan napas terakhirnya di wilayah Awrangabad pada tahun 1707 dan jasadnya dimakamkan secara sederhana di Khuldabad. Setelah wafatnya, tongkat estafet kepemimpinan Dinasti Mughol diteruskan oleh putra keduanya yang bernama Muhammad

Muazhzhah, yang kemudian naik takhta dengan gelar Bahadur Syah. Namun, periode transisi ini diwarnai oleh gelombang ketidakstabilan politik berupa pemberontakan dari berbagai kelompok non-Islam yang muncul sebagai reaksi keras terhadap kebijakan ortodoksi agama yang sebelumnya diterapkan oleh Aurangzeb. Pergolakan tersebut meletus di berbagai titik strategis, seperti pemberontakan kaum Rajput di Jodpur, gerakan kaum Sikh di wilayah Punjab, hingga perlawanan kaum Maratha di daratan India bagian selatan.

### **Kemajuan Sektor Ekonomi dan Struktur Agraria**

Meskipun menghadapi tantangan internal, Dinasti Mughol mencatatkan berbagai pencapaian signifikan di bawah kepemimpinan para sultan besarnya, mulai dari era Akbar hingga masa Aurangzeb, terutama dalam aspek ekonomi, seni, dan kebudayaan. Di sektor ekonomi, kekaisaran berhasil mengintegrasikan program pengembangan di bidang pertanian, pertambangan, dan jaringan perdagangan internasional. Walaupun demikian, struktur finansial kerajaan sebagian besar masih bersandar pada sektor agraris sebagai sumber pendapatan utama negara. Guna menjamin kelancaran arus pendapatan, pemerintah membangun sistem komunikasi dan administrasi yang tertata rapi dengan para petani berdasarkan pembagian unit lahan. Dalam sistem ini, *deh* diidentifikasi sebagai unit lahan terkecil, di mana gabungan dari beberapa *deh* tersebut akan membentuk sebuah komunitas desa yang disebut *pargana*.

### **Manajemen Pertanian dan Komoditas Utama**

Struktur sosial di komunitas petani dipimpin oleh seorang pejabat lokal yang disebut *mukaddam*, yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara otoritas pusat dan para penggarap lahan. Melalui perantara para *mukaddam* inilah, pemerintah kerajaan menjalankan haknya untuk memungut pajak sebesar sepertiga dari total hasil panen di seluruh negeri. Pada masa kejayaannya, komoditas agraris terpenting yang dihasilkan oleh kerajaan meliputi berbagai jenis biji-bijian, padi, kacang-kacangan, tebu, sayuran, serta rempah-rempah; selain itu, tanaman industri seperti tembakau, kapas, nila, dan bahan pewarna alami juga menjadi produk unggulan (Yatim, 2000).

### **Ekspor Internasional dan Hubungan Dagang Global**

Selain untuk mencukupi kebutuhan domestik, hasil-hasil pertanian tersebut juga menjadi komoditas ekspor yang dikirim ke pasar internasional di Eropa, Afrika, Jazirah Arab, hingga Asia Tenggara. Perdagangan ini biasanya dibarengi dengan pengiriman hasil kerajinan tangan berkualitas tinggi, seperti kain tenun dan gordyn tipis yang diproduksi secara massal di sentra industri Gujarat dan Bengal. Untuk semakin memacu produktivitas dan memperluas jaringan pasar, Sultan Jahangir memberikan izin resmi kepada pihak Inggris pada tahun 1611 serta Belanda pada tahun 1617 untuk mendirikan pabrik-pabrik pengolahan hasil bumi di wilayah pelabuhan Surat.

### **Perkembangan Seni Sastra dan Budaya**

Seiring dengan kemakmuran di bidang ekonomi, ranah seni dan budaya pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu ekspresi seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana yang ditulis dalam bahasa Persia maupun bahasa lokal India. Salah satu sastrawan India yang paling berpengaruh adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang

sufi yang melahirkan karya legendaris berjudul *Padmavat*, sebuah narasi alegoris yang sarat akan pesan-pesan moral mengenai kebajikan jiwa manusia.

### **Warisan Arsitektur dan Historiografi**

Pada era kepemimpinan Aurangzeb, tradisi penulisan sejarah tetap berlanjut dengan munculnya sejarawan seperti Abu Fadhl yang menyusun karya monumental *Akbar Nama* dan *Aini Akhbari*, yang mendokumentasikan perjalanan kerajaan berdasarkan figur para pemimpinnya. Namun, warisan paling spektakuler yang masih dapat disaksikan hingga hari ini adalah mahakarya arsitektur yang sangat indah dan mengagumkan. Di masa Sultan Akbar, kemajuan ini terlihat dari pembangunan kota istana Fatpur Sikri, berbagai villa, dan masjid-masjid megah. Puncak keindahan arsitektur dicapai pada masa Syah Jahan melalui pembangunan masjid berlapis mutiara, kompleks makam Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, serta istana-istana indah di Lahore (Yatim, 2000).

### **Masa Kemunduran Dinasti Mughol**

Para penguasa yang memegang tampuk kekuasaan Dinasti Mughol pasca-era Aurangzeb umumnya dikenal sebagai pemimpin yang jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan para sultan pendahulu mereka. Hingga ambang tahun 1857, otoritas para sultan Mughol kian memudar dan tidak lagi mampu mengendalikan wilayah kedaulatan yang sangat luas, di mana saat yang sama kekuatan masyarakat Hindu menjadi sangat dinamis dalam melakukan pergerakan. Kondisi krisis ini semakin diperparah oleh adanya konflik internal di lingkungan istana terkait perebutan kekuasaan, serta hantaman invasi eksternal yang dilakukan oleh Nadir Syah dari Dinasti Safawiyah pada 1739 serta Ahmad Durrani dari Afghanistan antara tahun 1747 hingga 1769.

Eksistensi politik para sultan Mughol pada periode ini mengalami stagnasi yang akut, tanpa adanya tanda-tahun perkembangan yang berarti, dan justru terus terperosok dalam kemunduran. Situasi ini diperburuk oleh cengkeraman penjajah Inggris yang berawal dari pemberian izin perdagangan kepada *British East India Company* (BEIC) sejak tahun 1610, di mana perusahaan tersebut kian leluasa mendirikan pabrik dan menguasai ekspor komoditas penting seperti katun, sutra, dan rempah-rempah. Bahkan pada masa Sultan Akbar II, pihak kerajaan berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan hingga harus memohon kompensasi finansial kepada pihak Inggris demi menjaga kelangsungan hidup istana.

Ketika perusahaan dagang Inggris mengalami tekanan kerugian finansial, mereka mengambil langkah drastis dengan memungut pajak secara langsung kepada seluruh rakyat India melalui cara-cara yang kasar dengan jaminan dari sultan untuk memenuhi kebutuhan internal istana. Kebijakan opresif ini pada akhirnya memicu gelombang perlawanan di banyak wilayah, di mana rakyat India mulai bergerak di bawah komando Bahadur Syah II untuk melawan penjajahan Inggris. Namun, karena besarnya dukungan militer dan bantuan dari raja-raja Hindu yang memihak kolonial, Inggris akhirnya mampu mematahkan pemberontakan tersebut secara total.

Puncak kejatuhan dinasti ini terjadi saat Sultan Bahadur Syah ditangkap pada tanggal 20 September 1857, yang kemudian diikuti dengan proses pengadilan selama 41 hari hingga ia dinyatakan bersalah. Setelah itu, ia dibuang ke pengasingan di Rangoon (Burma/Myanmar) pada tanggal 7 Oktober 1858 dan menetap di sana hingga wafat pada 7 November 1862 (Rofiq,

2019 ). Peristiwa ini secara resmi menandai berakhirnya supremasi politik Dinasti Mughol di daratan India untuk selamanya, menyisakan umat Islam di wilayah tersebut yang harus berjuang keras mempertahankan eksistensi mereka.

Setelah Dinasti Mughol kehilangan legitimasi politiknya, Inggris secara penuh mengambil alih kendali pemerintahan, sementara kelompok masyarakat Hindu yang secara konsisten mendapatkan dukungan dari Inggris mulai mendominasi panggung kekuasaan di India. Perubahan konstelasi kekuasaan ini diikuti dengan tindakan agitasi secara terbuka terhadap kaum Muslimin, termasuk upaya sistematis untuk menggantikan bahasa Urdu yang merupakan bahasa resmi kekaisaran dengan bahasa Hindi serta penggunaan tulisan Devanagari.

Segala keinginan kelompok dominan tersebut dapat terlaksana dengan mudah berkat adanya dukungan politik dan militer yang kuat dari pemerintah kolonial Inggris. Di sisi lain, segala bentuk nota keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh masyarakat Muslim cenderung diabaikan begitu saja oleh pihak Inggris. Ketidakadilan ini juga terlihat saat Inggris menolak keras aspirasi umat Islam yang menginginkan adanya pembentukan wilayah administratif tersendiri di daerah Bengal yang merupakan basis mayoritas Muslim.

Dorongan kuat untuk memisahkan diri demi menghindari penindasan lebih lanjut akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1947, ketika komunitas Muslim India memproklamkan kemerdekaan negara Pakistan di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah. Namun, karena adanya kesenjangan pembangunan ekonomi yang sangat mencolok antara wilayah Pakistan Timur yang tertinggal jauh dari Pakistan Barat, wilayah Pakistan Timur akhirnya memisahkan diri dan mendirikan negara berdaulat bernama Bangladesh pada tahun 1971 yang dideklarasikan oleh Syekh Mujibur Rahman.

Secara ringkas, terdapat empat faktor fundamental yang menjadi penyebab utama hancurnya kejayaan Dinasti Mughol di India:

1. Terjadinya stagnasi total dalam pengembangan kekuatan militer, yang mengakibatkan kehadiran dan aktivitas Inggris tidak lagi dapat dikontrol oleh pihak kesultanan.
2. Adanya kemerosotan moral yang meluas di kalangan elit istana, sehingga memicu kecemburuan sosial serta ketidakpuasan dari para politisi dan rakyat jelata terhadap kesultanan.
3. Kebijakan keagamaan yang kaku pada masa Sultan Aurangzeb justru menjadi bumerang bagi para sultan penerusnya yang lemah, karena kebijakan tersebut memicu sentimen fanatisme dari kelompok non-Muslim, khususnya masyarakat Hindu.
4. Para sultan yang berkuasa pasca-Aurangzeb terjebak dalam krisis kepemimpinan yang kronis, di mana upaya-upaya untuk mengembalikan kewibawaan kerajaan selalu berakhir dengan kegagalan (Suhaedi, 2013 ).

#### **D. PENUTUP**

Dinasti Mughol India adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan Asia Selatan. Keberhasilannya dalam membangun sistem administrasi yang kuat, ekonomi yang berkembang, serta karya seni dan arsitektur monumental tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan kuat para sultannya pada masa awal hingga pertengahan kekuasaan. Namun, melemahnya kepemimpinan setelah masa Aurangzeb, konflik internal istana, meningkatnya resistensi masyarakat Hindu, serta intervensi kolonial Inggris melalui BEIC menjadi faktor utama keruntuhan dinasti ini pada 1858

Kajian sejarah ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya memerlukan kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga kepemimpinan visioner serta kemampuan menjaga

kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Pelajaran dari runtuhnya Dinasti Mughol dapat menjadi refleksi bagi studi sejarah politik Islam dan dinamika kekuasaan global di era modern.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Asher, C. B. (1992). *Architecture of Mughal India*. Cambridge University Press.
- Bosworth, C. E. (1963). *The Ghaznavids: Their empire in Afghanistan and Eastern Iran, 994-1040*. Edinburgh University Press.
- Chandra, S. (2002). *Parties and politics at the Mughal Court, 1707-1740*. Oxford University Press.
- Dalrymple, W. (2019). *The anarchy: The relentless rise of the East India Company*. Bloomsbury Publishing.
- Eraly, A. (2000). *The Mughal throne: The saga of India's great emperors*. Phoenix Press.
- Eraly, A. (2007). *The Mughal world: Life in India's last golden age*. Penguin Books.
- Gascoigne, B. (1971). *The great Moghuls*. Harpers and Row Publishers.
- Habib, I. (2014). *The agrarian system of Mughal India, 1556-1707*. Oxford University Press.
- Jackson, P. (1999). *The Delhi Sultanate: A political and military history*. Cambridge University Press.
- Nasution, H. (1978). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya (Jilid 1)*. UI Press.
- Nasution, S. (2013). *Sejarah peradaban Islam*. Yayasan Pusaka Riau.
- Richards, J. F. (1993). *The Mughal Empire*. Cambridge University Press.
- Rofiq, A. C. (2019). *Cara memahami sejarah Islam*. IRCiSoD.
- Suhaedi, H. S. (2013). Kesultanan Mughol di India (Tahun 1526-1858). *Jurnal Tsaqafah*, 11(2), 193-208.
- Thackston, W. M. (1996). *The Baburnama: Memoirs of Babur, prince and emperor*. Oxford University Press.
- Tim Penyusun. (2003a). *Ensiklopedi Islam (Jilid 3)*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Tim Penyusun. (2003b). *Ensiklopedi Islam (Jilid 5)*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Truschke, A. (2017). *Aurangzeb: The life and legacy of India's most controversial king*. Stanford University Press.
- Wink, A. (2002). *Al-Hind: The making of the Indo-Islamic world*. Brill.
- Yatim, B. (2000). *Sejarah peradaban Islam*. RajaGrafindo Persada.